

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbincangan mengenai kemiskinan di Kalimantan Selatan relatif jarang ditemui. Pada seminar-seminar, loka karya, ekspos media, pertemuan pemerintahan, serta penelitian-penelitian mengenai tingkat kemiskinan relatif jarang sekali.

Perbincangan maupun pembahasan yang relatif jarang sekali itu rupanya bukan hanya terjadi di Kalimantan Selatan saja, tetapi juga merupakan fenomena di hampir keseluruhan provinsi di Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Prijono Tjiptoherijanto¹, “Masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan masih merupakan topik yang hangat untuk dibicarakan; terutama kalau mengingat pada besarnya pengangguran yang kronis disebabkan masih adanya pekerjaan di bawah produktivitas (*underemployment*) serta rendahnya kualitas tenaga kerja kita. Sementara diduga adanya hubungan yang positif antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan”.

Pada Kota Banjarmasin sendiri, ketika menelusuri jalan-jalan kota, relatif tidak mungkin pandangan mata tidak melihat keberadaan orang miskin. Mulai dari pengamen anak-anak, pemungut sampah, penjual bensin pada sisi jalan, penjaga parkir, penjual koran pada peremparan jalan, belum lagi yang sering ditemui di

¹ Prijono Tjiptoherijanto, *Masalah Ekonomi dalam Fakta dan Analisa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara) h. 13

pasar-pasar tradisional seperti penjual sayur, penjual ikan kering, dan masih banyak lagi jika perlu untuk disebutkan satu-persatu. Tetapi hanya sedikit atau sama sekali tidak ada yang menjelaskan penyebab-penyebab ini, sebagian besar tidak berdasarkan sejarah, dan hampir sama sekali tanpa informasi ekonomi².

Dalam teori ekonomi sendiri, terdapat beberapa variabel yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang memang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi investasi, jumlah penduduk bekerja pada angkatan kerja, dan variable lainnya yang telah dilakukan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. Variabel-variabel tersebut sedikit banyaknya terealisasi di Kalimantan Selatan, tetapi pembahasan mengenai kemiskinan bagi pemerintah serta akademisi, maupun dalam media, tidak mencuat dalam ruang publik.

Data statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan mengenai tingkat kemiskinan menyatat, jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 sebesar 184.297 orang atau sebesar 4,76 % dari 3.854.485 jumlah penduduk Kalimantan Selatan.³ Masih terdapat ratus ribuan penduduk Kalimantan Selatan yang miskin.

N. Gregory Mankiw menyatakan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Secara

² Penny, D. H., *Starvation: The Role of the Market System*, diterjemahkan oleh Ace Partadiredja, dkk, (Jakarta: UI-Press, 1990)

³Badan Pusat Statistik. *Kalimantan Selatan dalam Angka 2014*. Banjarmasin: BPS

umum, orang-orang miskin itu biasanya lebih rentan terhadap berbagai penyakit sosial, mulai dari gaya hidup menggelandang yang kurang manusiawi, ketergantungan obat bius, kekerasan rumah tangga, masalah-masalah kesehatan, kehamilan remaja di luar nikah, buta huruf, pengangguran, dan prestasi pendidikan yang rendah. Anggota keluarga miskin biasanya memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal, dan mereka juga lebih rapuh sehingga lebih mudah untuk menjadi korban kriminalitas. Meskipun sulit untuk memisahkan rangkaian sebab dan akibat kemiskinan, tidak bisa dibantah bahwa kemiskinan senantiasa terkait erat dengan berbagai penyakit ekonomi dan sosial.⁴

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan acuan garis kemiskinan, yaitu konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs approach*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Maka garis kemiskinan atau batas kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat

⁴ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1* (Alih Bahasa oleh Haris Munandar), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), H. 587

ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi.⁵

BPS Kalimantan Selatan menyatat pada tahun 2013, garis kemiskinan memiliki rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp. 300.329 per bulan, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 269.714 per bulan. Maka pendapatan per kapita per bulan jika tidak mencapai garis kemiskinan, maka masuk dalam kategori miskin.⁶

Salah satu peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yakni meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi. PDRB juga merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, PDRB dapat mengurangi angka kemiskinan.

Investasi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Pertumbuhan investasi dapat mengembangkan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang sangat bernilai dari produksi barang-barang dan jasa-jasa sebelumnya. Peningkatan investasi juga dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan

⁵ www.id.m.wikipedia.org/wiki/Garis_Kemiskinan, diakses pada tanggal 23 Desember 2014 pukul 22.00 Wita.

⁶ Badan Pusat Statistik. *Kalimantan Selatan dalam Angka 2014*. Banjarmasin: BPS

meningkatnya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Peningkatan investasi sangat penting bagi provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan yang kaya raya sumber daya alam, membutuhkan modal untuk mengelola sumber daya tersebut. Sumber daya alam yang memberikan kontribusi pada perekonomian Kalimantan Selatan seperti: perkebunan, pertanian, pariwisata, perikanan, pertambangan, dan sektor-sektor lainnya yang perlu ditingkatkan melalui peningkatan investasi.

Selain itu, jumlah angkatan kerja terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk maka angkatan kerja menjadi semakin besar. Hal itu dapat menjadi beban tersendiri bagi perekonomian. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan masalah pengangguran. Orang-orang yang menganggur ini secara otomatis tidak akan memperoleh penghasilan. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan pun mereka tidak bisa. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesejahteraannya menurun. Hal tersebut berlawanan dengan harapan pemerintah, yaitu semakin banyaknya jumlah angkatan kerja diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian. Jika meningkatnya jumlah penduduk angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh variabel-variabel yang telah diuraikan, terhadap pengurangan

tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan. Sehingga penulis mengambil judul penelitian: **“Analisis Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Realisasi Investasi, dan Tingkat Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi investasi, dan tingkat Angkatan Kerja berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan?
2. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi investasi, dan tingkat Angkatan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan?

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu tingkat kebenarannya masih perlu diuji.

Berdasarkan rumuan masalah yang dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi investasi, dan tingkat Angkatan Kerja secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi investasi, dan tingkat Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi investasi, dan tingkat Angkatan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi investasi, dan tingkat Angkatan Kerja berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.

2. Sebagai referensi untuk menganalisa masalah-masalah yang memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan.
3. Sebagai tambahan literatur bagi akademisi atau praktisi di Kalimantan Selatan.
4. Sebagai bahan dalam penyajian data bagi kampus atau perguruan tinggi di Kalimantan Selatan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman interpretasi dari judul serta permasalahan dari penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 1, menjelaskan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. Sedangkan Kemiskinan dalam ukuran BPS (Badan Pusat Statistik) ialah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari

dan kebutuhan pokok bukan makanan. Pada penelitian ini, tingkat kemiskinan didefinisikan berdasarkan pengertian dari BPS.⁷

2. PDB (Produk Domestik Bruto) adalah nilai pasar semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di sebuah negara selama kurun waktu tertentu.⁸ sedangkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berarti nilai pasar semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di sebuah wilayah regional (provinsi) selama kurun waktu tertentu.
3. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.⁹ Oleh karena itu nilai tingkat investasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik merupakan paduan dari Proyek-proyek Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Proyek-proyek Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah disetujui oleh pemerintah. Dalam definisi operasional penelitian ini definisi investasi dan nilai tingkat investasi mengacu pada hal tersebut.

⁷ <http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50>, diakses pada tanggal 9 Januari 2015 pada pukul 09.46 Wita.

⁸ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 2* (Alih Bahasa oleh Haris Munandar), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), H. 7

⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), H. 107

4. Angkatan Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.¹⁰ Dalam konsep Badan Pusat Statistik penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.¹¹ Dalam definisi operasional penelitian ini angkatan kerja mengikuti standar usia yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelehaan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan kemiskinan, diantaranya adalah:

Penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011 oleh Okta Ryan Pranata Yudha (77111409012) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 2013. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi. Penelitian ini menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis meneliti tentang kemiskinan yang variabel *dependentnya* sama dengan skripsi ini, hanya saja cakupan wilayah dan variabel *independent* yang berbeda. Keunggulan dari penelitian ini adalah meneliti

¹⁰ Ibid, H. 19

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Agustus 2013*, (Banjarmasin: BPS, 2013), h. v

beberapa dan membandingkan beberapa variabel *independent* (pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi) dan memberikan masukan terhadap perekonomian Indonesia.

Penelitian tentang Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kota Surabaya oleh Atu Nuri Amin (0611010085) Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 2010. Penelitian ini mengambil rumusan masalah, apakah terdapat peningkatan pendapatan masyarakat di Kota Surabaya antara sebelum dan sesudah adanya Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah, terletak pada jumlah variabel *independent*, dan kesamaannya terletak pada variabel *dependent*, yakni tingkat kemiskinan yang pada penelitian ini penanggulangan kemiskinan dibuktikan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan pada skripsi penulis ukurannya ialah tercapainya *basic needs approach* masyarakat.

Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jelbuk Kota Jember oleh Vendi Wijanarko (080810101083) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2013. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel *independent*, yaitu curahan jam kerja, pendidikan, dan usia, dengan variabel *dependent* penghasilan keluarga miskin. Pada penelitian ini peningkatan kemiskinan digambarkan dengan penghasilan keluarga miskin yang meningkat, sedangkan pada skripsi penulis peningkatan kemiskinan berdasarkan ukuran tercapainya *basic needs approach* masyarakat.

Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Menukarkan Uang di Luar Area Bank di Banjarmasin oleh Norwilistini (1101150124) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin 2015. Penelitian ini terdiri dari empat variabel *independent*, yaitu faktor sosial, pribadi, psikologis, dan lokasi, dengan variabel *dependent* keputusan masyarakat di Banjarmasin memilih menukarkan uang di luar area bank. Dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan masyarakat di Banjarmasin memilih menukarkan uang di luar area bank adalah variabel faktor pribadi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini, yakni tentang Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Realisasi Investasi, Tingkat Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Selatan. Kemudian dirumuskan permasalahan, hipotesis, dan tujuan penelitian serta diuraikan manfaat hasil penelitian. Dari judul penelitian ini dikemukakan definisi operasional yang diperlukan untuk memahami istilah-istilah yang diharapkan tidak

menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penulis, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang akan diajukan. Dalam bab ini juga akan dijabarkan tentang kerangka dari permasalahan yang ada, yang berisikan tentang definisi dan teori mengenai penelitian terhadap permasalahan tersebut.

BAB III Menguraikan tentang metodologi penelitian. Terdiri atas ruang lingkup penelitian, sumber dan jenis data, pengolahan data, dan metode analisis data.

BAB IV Menguraikan analisa dan pembahasan. Berisi gambaran umum provinsi Kalimantan Selatan beserta data jumlah penduduk. Gambaran variabel yang diteliti: gambaran jumlah penduduk miskin, gambaran PDRB, perkembangan investasi, dan perkembangan jumlah angkatan kerja. Hasil regresi linier berganda, beserta hasil uji multikolinieritas, hasil uji normalitas, dan hasil uji autokorelasi.

BAB V Merupakan bab penutup. Terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.